

**BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR IDENTITAS BANGSA DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTURAL INDONESIA**

Jihan Hulwa Nadhifah, M. Faidhil Akbar, Murny
Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Email: hanhulwa96@gmail.com, mfaidil1202200@gmail.com, murny.mpd@uin-suska.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara multikultural yang ditandai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis yang beragam. Keragaman ini berfungsi sebagai penghubung untuk mencapai keharmonisan, namun sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan, seperti yang terlihat dalam peristiwa-peristiwa seperti konflik Ambon, kerusuhan Poso, dan pertikaian antar agama. Pemahaman tentang multikulturalisme sangat penting untuk mengatasi kenyataan ini, yang mencakup aspek budaya, keragaman, dan tanggapan terhadap keragaman. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “kesatuan dalam keragaman”, mewujudkan nilai-nilai keharmonisan dan persatuan sosial, meskipun sering terjadi pertentangan dalam realitas sosial. Perbedaan etnis, agama, ras, dan budaya dapat menciptakan dinamika sosial yang kompleks, yang sering kali mengakibatkan konflik, diskriminasi, dan marginalisasi sosial. Konteks historis, terutama di bawah rezim Soeharto, menekankan monokulturalisme, yang kemudian memunculkan isu-isu kontemporer yang bersumber dari kedaerahan dan egoisme etnis. Konflik Sampit antara masyarakat Dayak dan Madura menggambarkan perlunya strategi integrasi yang efektif untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar motto, melainkan sebuah prinsip dasar untuk menyatukan masyarakat yang beragam, memfasilitasi keharmonisan sosial di tengah perbedaan. Mempromosikan pendidikan multikultural dan memanfaatkan media secara bertanggung jawab merupakan strategi penting dalam memupuk toleransi dan inklusivitas. Keterlibatan masyarakat secara aktif dan pemberdayaan sosial yang terorganisir sangat penting dalam memperkuat persatuan ini. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai multikultural diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik-praktik nasional. Mengakui keragaman sebagai kekuatan, bukan perpecahan, adalah kunci untuk mempertahankan integritas Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam perpaduan budaya yang kaya

Kata kunci: Bhineka Tunggal Ika, Pilar Pendidikan, Masyarakat, Indonesia

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 348

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam kebudayaan, suku, etnis dan juga agama. Hal ini sudah menjadi ciri khas dan juga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa, juga dapat menjadi bumerang bagi kita dengan timbulnya konflik apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu disinilah peran dari semboyan bangsa kita yaitu “Bhineka Tunggal Ika” mengambil peran yang penting dalam menjaga kerukunan bangsa dari konflik SARA, yang memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu. Hal ini disampaikan dalam karyanya yang bertuliskan “Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan akan indahnya Negara Indonesia diciptakan. Banyaknya perbedaan dalam sebuah masyarakat di berbagai bidang menunjukkan adanya keberagaman. Dengan adanya keberagaman tersebut, memberikan peluang terjadinya perpecahan dalam masyarakat.” Oleh karena itu perlu adanya penanaman tentang makna dari Bhineka Tunggal Ika sebagai identitas negara kita.

Sebagai semboyan bangsa dan juga identitas nasional, Bhineka Tunggal Ika tidak hanya menjadi simbol belaka, Tetapi juga menjadi sebuah filosofis ditengah-tengah keberagaman suku bangsa dan budaya. Dikutip dari dijelaskan bahwa “Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol keterbukaan terhadap perbedaan, namun disertai dengan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau tidak mengancam persatuan.” nilai yang terkandung di dalamnya menjadi sebuah pilar kesadaran dan persatuan di dalam masyarakat multikultural.

Perkembangannya media informasi dan komunikasi yang begitu cepat, menyebabkan nilai toleransi, menghargai, menghormati, dan juga semangat persatuan mulai mengalami ancaman yang sangat serius. Kurangnya pantauan dalam membatasi informasi luar yang masuk melalui media social menyebabkan munculnya sifat intoleran, fanatisme sempit, dan juga perpecahan social menjadi sebuah ancaman yang nyata di depan mata kita yang mengancam keutuhan bangsa. Hal-hal tersebut dapat kita cegah melalui penanaman nilai Bhineka Tunggal Ika. Fitri Handayani menyampaikan didalam tulisannya penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika dikalangan pelajar dapat menekan sifat intoleran dan juga memperkuat kohensi social ditengah kemajemukan. Oleh karena itu perlunya penguatan kembali terhadap makna Bhineka Tunggal Ika di kalangan generasi muda sekarang, agar dapat merangkul keberagaman dan juga menumbuhkan semangat juang yang inklusif.

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji makna dari Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar identitas bangsa kita dalam ranah masyarakat yang multikultural, guna untuk semangat juang dan juga sifat toleransi yang tinggi. Serta dapat mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat di terapkan dan juga di jaga dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.

A. Realitas Sosial Multikultural di Indonesia

Indonesia adalah negara yang multikultural, hal dapat kita lihat dari kondisi social, budaya dan juga geografi yang sangat beragam. Keragaman ini berperan sebagai penghubung antara kita dalam mencapai keharmonisan. Tetapi fakta yang ada, justru perbedaan sering kali memicu konflik dan juga ketegangan diantara kita. Sudah banyak sekali konflik yang pernah terjadi di negara kita tercinta ini, seperti konflik Ambon, kerusuhan di Poso, pertikaian antar agama di Aceh tahun 2015, perselisihan antar agama di Lampung Selatan, serta aksi 212 di Jakarta¹. Semua hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman kita terhadap makna dari multicultural tersebut

Sebelum kita mengupas realitas sosial yang beragam di Indonesia, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan multikulturalisme. Sebagai warga

¹ Syathori A. (2023) *Urgensi Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Lombok : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Indonesia, kita pasti sudah akrab dengan istilah multikultural. Multikulturalisme mencakup tiga aspek, yaitu²:

1. Budaya.
2. Keragaman yang ada.
3. Tindakan spesifik terhadap respon kepada keragaman

Akhiran “isime” dalam kalimat multicultural menunjukkan bahwa multicultural merupakan suatu ajaran yang bersifat normatif di dalam Masyarakat. Proses serta metode penerapan multikulturalisme sebagai doktrin normatif dapat menjadi nyata melalui pelaksanaan gagasan-gagasan di dalam kebijakan politik, khususnya khususnya dalam kebijakan pendidikan.³

Multikulturalisme muncul ketika suatu komunitas dapat mengapresiasi keberagaman, perbedaan, dan keragaman budaya dari beragam ras, suku, etnis, dan agama. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan makna dan nilai tentang harmoni serta persatuan dalam kehidupan sosial. Prinsip ini berasal dari pemikiran mengenai variasi bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama yang memengaruhi suatu bangsa⁴

Namun, realitas sosial yang terjadi di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan etnis, agama, ras, budaya, dan kelompok dapat menghasilkan dinamika sosial yang rumit dan kompleks. Dalam kenyataan sosial, perbedaan ini seringkali memicu berbagai konflik, seperti sengketa antar kelompok, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, marginalisasi sosial dan ekonomi, serta ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Selain itu, proses integrasi sosial seringkali tidak berjalan secara konsisten, yang berdampak pada pembentukan identitas kolektif dan perubahan sosial yang tidak selalu inklusif. Oleh karena itu, negara yang multikultur seperti Indonesia berupaya menanamkan kesadaran multikultur melalui makna bhineka Tunggal Ika. Multikulturalisme adalah pengakuan terhadap keberagaman dan kemajemukan budaya

B. Tantangan Integrasi Dalam Masyarakat Majemuk

Multikulturalisme selalu dihubungkan dengan keberagaman etnis, agama, bahasa, warna kulit, dan lainnya. Secara historis, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto menerapkan monokulturalisme dan menganggap multikulturalisme sebagai tabu, yang dikenal dengan istilah SARA (suku, agama, dan ras). Sejalan dengan semangat reformasi yang bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan, terjadi peningkatan fenomena “provinsialisme” yang berkaitan dengan etnisitas. Akibatnya, timbul rasa egosentris dan etnosentris yang kemudian menciptakan masalah yang kompleks. Tragedi kemanusiaan di era 2000-an di lokasi-lokasi seperti Poso, Ambon, Sambas, Madura, dan lain-lain adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa semangat otonomi dan desentralisasi tanpa didukung kesadaran multikulturalisme menciptakan masalah baru yang lebih kompleks untuk diselesaikan. Namun, jika kita melihat sejarah pembentukan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa kita telah menunjukkan contoh bagaimana mereka

² Suryana Y., Rusdiana (2015) *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.

³ Hati S. T. (2023) Upaya Meningkatkan Kesadaran Multikultural, *IJTIMAIYAH : Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol 4 No 2

⁴ Sudrajat (2014) Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran, *Jurnal Pembangun Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Vol 2 no. 1

mengubah bekas wilayah Hindia Belanda ini menjadi sebuah negara dengan sikap toleransi, penuh pengertian, dan mengedepankan kesatuan bangsa dan negara⁵.

Membicarakan tentang toleransi itu tidak akan lepas dengan kesetaraan yang dapat membentuk persaingan yang sehat, perdamaian, kreativitas, dan saling menghormati. Karena jika hal ini tak dapat tercapai, akan dapat timbul diskriminasi antara etnis, agama, dan lain-lain⁶. Terlihat dalam situasi sekarang, di mana terjadi banyak perselisihan antar kelompok, baik dalam hal agama, suku, ras, maupun budaya. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2001 di Kalimantan terjadinya perang sampit yang menewaskan ratusan korban jiwa

Konflik Sampit yang berlangsung pada Februari 2001 bukan merupakan kejadian pertama antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Konflik antara mereka telah berlangsung lama, disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan kultural. Kedatangan pertama warga Madura ke Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 1930 melalui program transmigrasi yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, imigran dari Madura mencakup sekitar 21 persen dari populasi Kalimantan Tengah.

Dengan berlalunya waktu, ketegangan mulai timbul akibat meluasnya kompetisi ekonomi. Para pendatang dari Madura dianggap lebih menguasai sektor-sektor penting seperti kehutanan, tambang, dan perkebunan, sejalan dengan perubahan kebijakan hukum yang memberi mereka akses pada berbagai industri komersial. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan di antara masyarakat Dayak yang merasa terasing di tanah kelahiran mereka. Ketidakadilan ekonomi ini kemudian meluas menjadi isu sosial yang kian memburuk.

Selain isu ekonomi, perbedaan budaya dan nilai antara kedua etnis juga memperburuk konflik ini. Contohnya, tradisi masyarakat Madura yang membawa parang atau celurit sebagai bagian dari kebiasaan membuat masyarakat Dayak merasa terintimidasi. Persepsi yang berbeda ini memperkuat stigma dan prasangka antaretnis, yang menjadi pemicu konflik horizontal⁷.

Puncak peristiwa terjadi pada 18 Februari 2001, kedua suku ini terlibat dalam pertikaian, dengan banyak korban dari Suku Dayak dan Suku Madura. Keesokan harinya, Suku Madura merasa diuntungkan oleh banyaknya korban dari Suku Dayak, sehingga mereka berencana menguasai Sampit dan menjadikannya Sampang II. Pada 20 Februari 2001, situasi berubah ketika banyak orang Dayak dari luar kota datang ke Sampit. Dalam konflik ini, komunitas Dayak menggunakan berbagai alat perang tradisional seperti mandau, lunju atau tombak, sumpit, hingga senjata api yang disebut dengan dum-dum, sementara beberapa juga menggunakan senjata tradisional celurit serta beberapa bom buatan sendiri. Selama periode sejarah konflik Sampit, dari Desember 1996 hingga Januari 2007, terjadi kematian sekitar 600 nyawa⁸.

Oleh sebab itu, peristiwa konflik antara Dayak dan Madura dalam konflik Sampit menjadi salah satu ilustrasi nyata dari tantangan integrasi multicultural dalam masyarakat yang beragam. Keanekaragaman budaya, jika tidak ditangani secara tepat, dapat berpotensi menjadi sebuah konflik ketika disertai dengan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Integrasi sosial di masyarakat yang beragam memerlukan lebih dari sekadar kebijakan administrative, tetapi diperlukan juga pembangunan kepercayaan, dialog antar kelompok,

⁵ Sudrajat (2014) Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran, *Jurnal Pembangun Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Vol 2 no. 1

⁶ Dohut Y. S., Trinitas dan Bhineka Tunggal Ika : Menggali Inspirasi Hidup Bersama dalam Pluralisme Agama di Indonesia, *Jurnal Amanat Agung*, Vol 9, no.2

⁷ *Konflik Sampit : Latar Belakang, Konflik, dan Penyelesaian* (2021, 30 juli), Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/konflik-sampit-latar-belakang-konflik-dan-penyelesaian?page=3>.

⁸ Intan N. P., Nadzifah S., Hakim A. L., Asy'ari M. H. (2022) PERANG SAMPIT (KONFLIK SUKU DAYAK DENGAN SUKU MADURA) PADA TAHUN 2001, *SOSIAL : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol* no*

serta mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif dan berbasis komunitas. Tanpa hal itu, keragaman dapat menjadi penyebab perpecahan

C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Nilai Perekat Bangsa

Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam membangun atau menyelenggarakan kehidupan yang nasionalis di dalam negeri. Untuk menyatukan keberagaman, Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari Bahasa Jawa Kuno yang mengandung makna "berbeda-beda tapi tetap satu jua".

Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto bangsa Indonesia bukan hanya ungkapan, melainkan sebuah realitas yang harus diwujudkan sebagai nilai pemersatu bangsa di tengah beragamnya suku, agama, ras, dan budaya. Dalam konteks kehidupan yang beragam, semangat ini menjadi dasar penting untuk membangun keharmonisan dan mencegah perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi semua komponen masyarakat, terutama pemerintah dan institusi pendidikan, untuk menguatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika melalui pendidikan multikultural sejak usia dini.

Melalui istilah "berbeda-beda" kita dapat memahami adanya keragaman, atau kebhinekaan tidak membuat kita terpecah, tetapi membuat kita semakin kuat. Keberagaman atau bangsa Indonesia mencakup: suku, etnis, budaya, agama, serta bahasa. Dengan kemajuan dalam ketatanegaraan, menyebabkan munculnya bentuk baru dari semboyan kita. Dengan demikian, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, kebhinekaan yang ada di bangsa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kebhinekaan social
2. Kebhinekaan agama
3. Kebhinekaan politik.

Kebhinekaan bukanlah "hal" yang dapat diberikan nilai positif atau negatif. Kebhinekaan merupakan sebuah kenyataan atau kondisi yang bersifat alami, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa⁹. Kebhinekaan merupakan sebuah fakta yang seharusnya netral, dan tidak dapat di nilai baik atau buruk nya

Ungkapan "tetap satu jua" mencakup dimensi ruang dan waktu tanpa Batasan apapun, karena untuk menjadi "tetap satu jua" diperlukan keberadaan sebuah wadah yaitu bangsa, yang dibentuk melalui upaya dari setiap individu dengan "bersatu" dan "menyatu". Kesatuan dan persatuan adalah situasi atau kondisi yang diciptakan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif. Keduanya adalah usaha manusia yang dapat dievaluasi dengan hal yang baik atau buruk. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan dapat dianggap sebagai sebuah nilai.

Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna nilai persatuan dan nilai kesatuan. Persatuan berkaitan dengan kesatuan, yaitu kumpulan dari elemen-elemen yang bersatu. Persatuan memerlukan usaha dari setiap bagian untuk bersatu menjadi satu kesatuan. Bagian-bagian tersebut masih ada dan mempunyai karakteristiknya masing-masing, namun bagian-bagian itu bersatu menjadi satu kesatuan, sehingga keseluruhannya menjadi lebih besar daripada bagian-bagian individualnya. Kesatuan adalah keadaan bersatu, yang memiliki sifat tunggal. Di dalam kesatuan, bagian-bagian tidak tampak lagi karena telah bersatu atau menyatu menjadi satu. Karakter setiap bagian tidak lagi terpisah, yang muncul adalah karakter baru yaitu karakter kesatuan.

⁹ Anggono B. D., Damaitu E. R., (2021), Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 1, no. 1

Persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan gabungan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, dengan aneka tradisi, budaya, dan struktur sosial yang beragam, serta penyatuan wilayah yang mencakup ribuan pulau dengan area yang sangat luas. Kesatuan dan persatuan pada dasarnya merupakan satu. Ia adalah sesuatu yang memiliki sifat keutuhan yang tidak bisa dipecah. Walaupun begitu, sifat kesatuan itu mencakup dua kondisi, yaitu: pertama, kesatuan yang berbentuk kesatuan tunggal; dan kedua, kesatuan yang merupakan kombinasi atau penggabungan dari bagian-bagian yang bersama-sama membentuk struktur menjadi sebuah kesatuan yang baru (persatuan). Kesatuan tunggal dihasilkan dari proses bergabung, sementara persatuan terbentuk melalui proses pengumpulan. Dalam kesatuan hanya terdapat karakter sebagai keseluruhan, sedangkan dalam persatuan masih terlihat adanya perbedaan atau variasi.

Nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah satu nilai. Komitmen masyarakat Indonesia untuk bersatu dan menyatu menjadi bangsa serta negara Indonesia adalah suatu kesatuan. Oleh sebab itu, nilai yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika itu hanya satu dan utuh yaitu nilai tunggal. Nilai yang disebut dalam satu kalimat tanpa menggunakan kata “dan”. Makna yang terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah “nilai persatuan dan kesatuan.” Sebuah nilai yang mencerminkan keberadaan nilai kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika.¹⁰

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekadar motto, tetapi merupakan sebuah prinsip yang sangat penting untuk menyatukan bangsa dalam kehidupan bernegara. Penilaian ini mengajarkan bahwa, meskipun Indonesia terbentuk dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik, semua elemen masyarakat tetap terhubung dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nilai persatuan yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai penghubung yang menyatukan perbedaan dan menghasilkan keharmonisan sosial. Sebagai nilai pemersatu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai landasan moral dan ideologis dalam mempertahankan keutuhan NKRI di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Oleh sebab itu, semangat ini harus senantiasa dipelihara, ditanamkan, dan diterapkan oleh setiap warga negara agar Indonesia tetap kuat dalam keberagamannya.

D. Strategi Penguatan Nilai Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang mencerminkan semangat kesatuan dalam perbedaan. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.380 pulau, 300 suku bangsa, dan beragam agama, Indonesia menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa¹¹. Namun, keragaman ini pasti akan membawa tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, seperti potensi pertikaian antar kelompok, diskriminasi, dan intoleransi. Untuk mempertahankan keharmonisan dan memperkuat persatuan, diperlukan strategi penguatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun diantaranya ialah

1. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan ide penting dalam sektor pendidikan, khususnya dalam menangani kompleksitas masyarakat yang beragam. Ide ini tidak hanya menekankan pemahaman berbagai budaya, tetapi juga berusaha menanamkan nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan inklusivitas dalam dunia Pendidikan.¹²

¹⁰ Riyanto S., Febrian, Zanibar Z., (2023) Bhineka Tunggal Ika : Nilai dan Formalitas Dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 20, No. 2

¹¹ Lubis M. R. (2024) Penguatan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural Tinjauan Lanjutan dari Galatia 5: 22-23 : Menurut Perspektif Sosiologi, *JURNAL KADESI : Jurnal Teologi dan PAK*, vol 6 No 2

¹² Adnyana P. E. S., Damanik F. H. S., Jaya A., Imronudin, Halim A., Utami P. iryani E., Ramadhanti D., Fatmawati (2025) *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : PT. Star Digital Publishing

Pendidikan multikultural secara jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1). Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis, adil, non-diskriminatif, serta menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, budaya, dan keragaman bangsa. Kedua pasal ini menunjukkan dasar yang kokoh untuk pendidikan multikultural karena mengakui keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial para peserta didik sebagai komponen dari sistem pendidikan nasional.¹³

2. Peran Media Masa dan Teknologi

Kemajuan teknologi di abad ke-21 memiliki dampak signifikan terhadap cara masyarakat saling berinteraksi dan membangun opini. Media memainkan peran penting dalam menciptakan narasi tentang keberagaman dan menumbuhkan rasa persatuan dengan menyajikan konten yang mencerminkan nilai-nilai toleransi serta menolak ujaran kebencian. Ini sejalan dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat (2) dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menegaskan pentingnya laporan yang akurat, seimbang, dan menghormati perbedaan.

Namun, derasnya aliran informasi dunia juga menimbulkan tantangan berupa konflik peradaban dan hilangnya nilai-nilai kebangsaan seperti keadilan, toleransi, dan kerjasama. Nilai-nilai ini sebenarnya adalah dasar penting untuk mempertahankan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, tetapi saat ini semakin terkikis oleh konten provokatif dan polarisasi di dunia digital.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital tidak hanya memberikan generasi muda keterampilan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi perubahan zaman. Melalui penguatan literasi ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menyaring informasi, menolak ujaran kebencian, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Ada tiga pendekatan utama dalam literasi digital yang bisa diterapkan untuk mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika¹⁴:

- a. Pengembangan Komunitas Belajar Digital. Komunitas ini dapat diterapkan pada lingkungan sekolah dan Masyarakat, yang mampu menciptakan rasa tanggung jawab, partisipasi, dan keterampilan melalui teknologi. Komunitas ini berfungsi sebagai media yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperbaiki mutu pendidikan.
- b. Penggunaan Media Sosial sebagai Wadah Informasi dan Diskusi, Media sosial memiliki peran dalam mendistribusikan nilai-nilai nasionalisme. Apabila digunakan secara tepat, media sosial bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan berdiskusi. Pemerintah daerah, terutama desa, harus aktif dalam melaksanakan pelatihan dan memberdayakan penggunaan media sosial dengan cara yang positif.
- c. Proyek Digital Berbasis Kegiatan Sosial, Ini adalah kolaborasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi. Dengan merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan kegiatan di media sosial, masyarakat

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

¹⁴ Yasni S., Matulesy A., Megasari E., Arifianto Y. D., Rahmat A., Widiati J. N., dkk (2021) *Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinekaan Di Tengah Covid-19*, Yogyakarta : ZAHIR PUBLISHING

diundang untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan.

Ketiga pendekatan tersebut adalah strategi fundamental untuk memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, khususnya toleransi, keadilan, dan kerja sama. Esensi utama dari nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah toleransi, yang mencakup toleransi terhadap keyakinan, kemanusiaan, dan perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terencana dan sadar dari seluruh komponen masyarakat agar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat nyata dengan baik melalui literasi digital, baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pemberdayaan Komunitas dan Lembaga Sosial

Penguatan prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan kunci untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman budaya, agama, dan sosial di Indonesia. Keterlibatan masyarakat melalui komunitas, organisasi sosial, dan lembaga kemasyarakatan sangat krusial dalam menciptakan toleransi dan kerukunan. Dibuktikan oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong pengoptimalan program toleransi antaragama.

Pengembangan masyarakat adalah elemen krusial dalam menciptakan peradaban suatu bangsa. Namun, usaha ini tidak sederhana karena menghadapi berbagai masalah seperti ketertinggalan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pembangunan perlu dilakukan dengan cara kolaboratif dan tidak mengesampingkan kearifan lokal, tradisi, serta budaya masyarakat setempat.

Salah satu pendekatan kunci dalam pengembangan komunitas adalah pemberdayaan yang bersifat terorganisir. Organisasi masyarakat bisa berfungsi sebagai alat untuk mendorong individu agar lebih berdaya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Walaupun pembentukannya memerlukan usaha dan semangat bersama, organisasi yang kokoh akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam membangun komunitas yang inklusif dan harmonis.

Dengan menguatkan organisasi masyarakat sebagai sarana pemberdayaan, semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak sekadar menjadi motto, namun juga direalisasikan dalam aksi nyata yang memperkuat persatuan di tengah keragaman.¹⁵

Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia bukan hanya sekadar lambang persatuan, melainkan juga sebagai dasar dalam menciptakan kehidupan kebangsaan yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Agar semangat kebhinekaan terjaga, diperlukan strategi untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan persaudaraan dengan menggunakan beragam pendekatan. Pendidikan multikultural memiliki peranan krusial dalam membentuk kepribadian generasi muda yang menerima perbedaan. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan media harus digunakan dengan bijaksana melalui literasi digital, sehingga ruang digital menjadi wadah untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan menanggulangi ujaran kebencian. Di samping itu, penguatan komunitas dan organisasi sosial menjadi langkah penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan inklusif. Ketiga metode ini saling mendukung dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya mempertahankan persatuan dalam keragaman.

Dalam usaha tersebut, posisi pemerintah menjadi penting sebagai fasilitator, penyusun regulasi, dan penggerak kolaborasi antar sektor. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional benar-benar mengintegrasikan prinsip-

¹⁵ Nawawi M. N (2023) *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Penguatan Pendidikan dan Kewirausahaan*, Yogyakarta : SELAT MEDIA PATNERS

prinsip multikulturalisme, menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung literasi digital, serta memperkuat kapasitas organisasi masyarakat melalui beragam program pemberdayaan. Melalui kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat membangun ekosistem yang menjadikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebagai semboyan, tetapi juga sebagai kenyataan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara multikultural dengan banyak perbedaan sosial, budaya, dan geografi. Keragaman seharusnya menciptakan keharmonisan, tetapi seringkali menimbulkan konflik, seperti di Ambon dan Poso. Multikulturalisme memiliki tiga aspek yang perlu diterapkan melalui kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman.

Multikulturalisme melibatkan keragaman etnis, agama, bahasa, dan warna kulit. Pada era Orde Baru di bawah Soeharto, multikulturalisme dianggap tabu dan lebih mendukung monokulturalisme. Reformasi dan otonomisasi membawa "provinsialisme" yang menimbulkan masalah akibat egosentrisme dan etnosentrisme. Tragedi kemanusiaan di tahun 2000-an menunjukkan bahwa otonomi tanpa kesadaran multikultural membuat masalah lebih rumit. Toleransi sangat penting untuk kesetaraan, mendorong persaingan sehat dan perdamaian. Tanpa itu, diskriminasi dapat terjadi, seperti pada konflik antara suku Dayak dan Madura. Konflik ini puncaknya terjadi pada 18 Februari 2001, menunjukkan tantangan dalam integrasi masyarakat yang beragam. Integrasi sosial memerlukan lebih dari kebijakan, tetapi juga pembangunan kepercayaan dan dialog antar kelompok.

Indonesia selalu menekankan persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa yang nasionalis. Untuk menyatukan keberagaman, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tapi tetap satu jua." Semboyan ini harus diwujudkan dalam menghadapi berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Semua elemen masyarakat, terutama pemerintah dan pendidikan, perlu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika melalui pendidikan multikultural.

Keberagaman di Indonesia meliputi suku, etnis, budaya, agama, dan bahasa. Semboyan ini mencakup tiga kategori: kebhinekaan sosial, kebhinekaan agama, dan kebhinekaan politik. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, semua elemen tetap terhubung dalam satu kesatuan. Nilai persatuan ini penting untuk menciptakan keharmonisan sosial dan menjaga keutuhan NKRI. Setiap warga negara harus menerapkan semangat ini agar Indonesia tetap kuat dalam keberagamannya.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang mencerminkan semangat bersatu dalam perbedaan. Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 17.380 pulau dan berbagai suku serta agama, memiliki kekayaan budaya yang juga dapat menimbulkan tantangan seperti konflik antar kelompok. Untuk menjaga keharmonisan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu diterapkan secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan multikultural yang menanamkan toleransi.

Media dan teknologi berperan penting dalam menyatukan masyarakat, namun tantangan dari informasi provokatif juga harus dihadapi dengan literasi digital. Pemberdayaan komunitas dan lembaga sosial sangat penting untuk menumbuhkan toleransi. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan yang mengintegrasikan multikulturalisme dan mendukung literasi digital. Regulasi yang tepat penting untuk mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

"Bhinneka Tunggal Ika: Indonesia Circumscribed Norm Multiculturalism," 2022)
Adnyana P. E. S., Damanik F. H. S., Jaya A., Imronudin, Halim A., Utami P. Iryani E., Ramadhanti D., Fatmawati (2025) *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : PT. Star Digital Publishing

- Anggono B. D., Damaitu E. R., (2021), Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 1, no. 1
- Dohut Y. S., Trinitas dan Bhineka Tunggal Ika : Menggali Inspirasi Hidup Bersama dalam Pluralisme Agama di Indonesia, *Jurnal Amanat Agung*, Vol 9,no.2
- fitri Handayani and others, *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM (IPI)*.
- Hati S. T. (2023) Upaya Meningkatkan Kesadaran Multikultural, *IJTIMAIYAH : Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol 4 No 2
- Intan N. P., Nadzifah S., Hakim A. L., Asy'ari M. H. (2022) PERANG SAMPIT (KONFLIK SUKU DAYAK DENGAN SUKU MADURA) PADA TAHUN 2001, *SOSIAL : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol* no*
- Konflik Sampit : Latar Belakang, Konflik, dan Penyelesaian* (2021, 30 juli), Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/konflik-sampit-latar-belakang-konflik-dan-penyelesaian?page=3>.
- Lubis M. R. (2024) Penguatan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural Tinjauan Lanjutan dari Galatia 5: 22-23 : Menurut Perspektif Sosiologi, *JURNAL KADESI : Jurnal Teologi dan PAK*, vol 6 No 2
- Nawawi M. N (2023) *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Penguatan Pendidikan dan Kewirausahaan*, Yogyakarta : SELAT MEDIA PATNERS
- Riyanto S., Febrian, Zanibar Z., (2023) Bhineka Tunggal Ika : Nilai dan Formalitas Dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 20, No. 2
- Sudrajat (2014) Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran, *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Vol 2 no. 1
- Sudrajat (2014) Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran, *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Vol 2 no. 1
- SuryanaY., Rusdiana (2015) *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanti E (2025) *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus
- Syathori A. (2023) *Urgensi Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Lombok : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Yasni S., Matulessy A., Megasari E., Arifianto Y. D., Rahmat A., Widiyanti J. N., dkk (2021) *Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinekaan Di Tengah Covid-19*, Yogyakarta : ZAHIR PUBLISHING